



LAPORAN TAHUNAN **PELABUHAN PERIKANAN** **NUSANTARA PEMANGKAT**

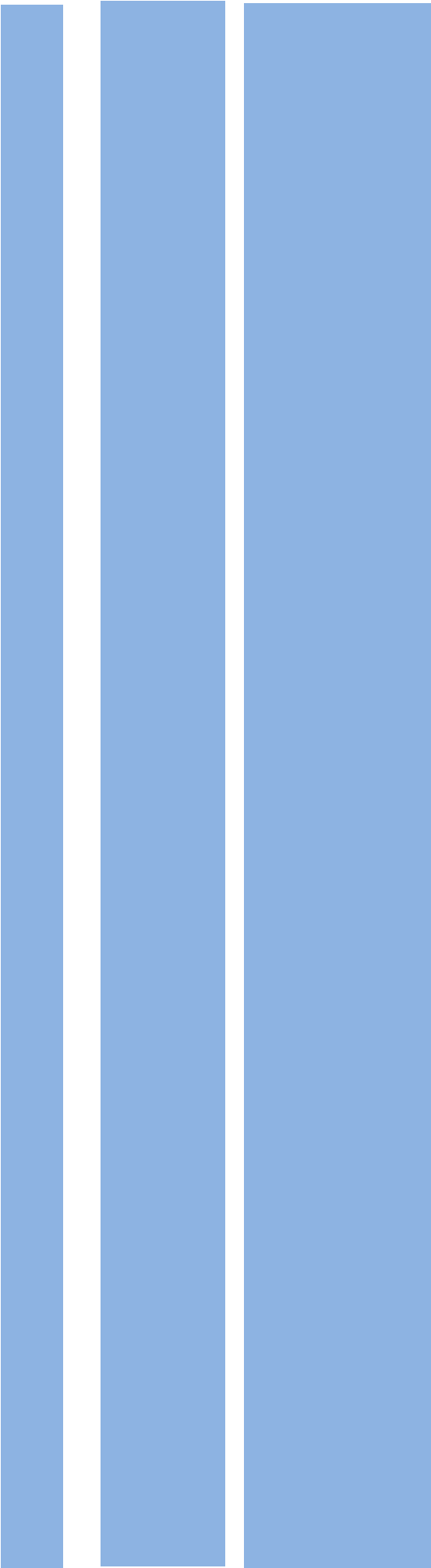
Tahun 2025



Jl Penjajap
Sambas, Kalimantan Barat
79453



PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2025



Jl Penjajap
Sambas, Kalimantan Barat 79453

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Pemangkat, Januari 2026
Kepala,

Anam Tofani, S.Pi., S.Mi.
NIP 19760722 200212 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	iv
Laporan Realisasi Anggaran	1
Neraca	2
Laporan Operasional	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5
Penjelasan Umum	5
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	11
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	17
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
Pengungkapan Penting Lainnya	39
Lampiran dan Daftar	x

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Pemangkat, Januari 2026
Kepala.

Anam Tofani, S.Pi., M.Si.
NIP 19760722 200212 1 003

Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat Tahunan Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahunan TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.091.066.122; atau mencapai 112 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp969.284.000;

Realisasi Belanja Negara pada Tahunan TA 2025 adalah sebesar Rp9.049.267.142; atau mencapai 95,11 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp9.514.512.000;

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp32.085.979.496; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.530.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp28.096.441.746; Properti Investasi sebesar Rp3.967.632.654; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp18.375.096;

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp34.771.561; dan Rp32.051.207.935;

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp953.675.740; sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp10.140.136.777; sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp9.186.461.037;) Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar 119.291.960; sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp9.067.169.077;)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp32.930.158.992; ditambah Defisit-LO sebesar (Rp9.067.169.077;) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp0;) dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp8.188.218.020; sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp32.051.207.935;.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis

kas.Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahunan Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	Th. 2025				Th. 2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (di Bawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara Dan Hibah	B.1					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	969.284.000	1.091.066.122	121.782.122	112,5	1.003.351.245
Jumlah Pendapatan dan Hibah		969.284.000	1.091.066.122	121.782.122	112,5	1.003.351.245
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	6.155.113.000	6.014.345.818	(140.767.182)	97,71	5.727.081.875
Belanja Barang	B.4	3.221.599.000	2.897.738.323	(323.860.677)	89,95	5.047.801.330
Belanja Modal	B.5	137.800.000	137.183.001	(616.999)	99,55	1.036.475.388
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-			
Jumlah Belanja		9.514.512.000	9.049.267.142	(512.839.407)	95,11	11.811.358.593

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA			
KANTOR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT			
NERACA			
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024			
(Dalam Rupiah)			
Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3		
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	-	
Beban Dibayar di Muka	C.1.8		
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.9	-	1.244.853
Persediaan	C.1.10	3.530.000	928.000
JUMLAH ASET LANCAR		3.530.000	2.172.853
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	3.102.080.000	3.102.080.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	9.274.291.920	9.170.186.439
Gedung dan Bangunan	C.2.3	9.752.668.981	9.522.651.981
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	27.652.985.287	27.652.985.287
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	565.000.000	565.000.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	- 22.250.584.442	- 21.089.990.816
JUMLAH ASET TETAP		28.096.441.746	28.922.912.891
Properti Investasi	C.3		
Properti Investasi	C.3.1	4.512.070.000	4.512.070.000
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.3.3	- 544.437.346	- 501.236.548
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		3.967.632.654	4.010.833.452
ASET LAINNYA			
Aset Lain- lain	C.4.2	8.461.052.366	9.395.602.366
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	- 8.442.677.270	- 9.376.068.885
JUMLAH ASET LAINNYA		18.375.096	19.533.481
JUMLAH ASET		32.085.979.496	32.955.452.677
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	21.475.705	21.763.358
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.3	13.295.856	3.530.327
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.5	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		34.771.561	25.293.685
JUMLAH KEWAJIBAN		34.771.561	25.293.685
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	32.051.207.935	32.930.158.992
JUMLAH EKUITAS		32.051.207.935	32.930.158.992
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		32.085.979.496	32.955.452.677
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan			
III. LAPORAN OPERASIONAL			

KANTOR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT
 LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	953.675.740	991.024.989
JUMLAH PENDAPATAN		953.675.740	991.024.989
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	6.014.345.818	5.720.484.875
Beban Persediaan	D.3	24.594.500	85.247.200
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.177.968.984	2.563.362.090
Beban Pemeliharaan	D.5	480.770.386	1.025.696.146
Beban Perjalanan Dinas	D.6	211.514.800	1.371.969.200
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.230.942.289	1.894.187.273
JUMLAH BEBAN		10.140.136.777	12.660.946.784
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		- 9.186.461.037	- 11.669.921.795
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		119.291.960	5.520.033
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		126.380.000	5.661.700
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		7.088.040	141.667
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	119.291.960	5.520.033
SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		- 9.067.169.077	- 11.664.401.762
POS LUAR BIASA	D.12	-	-
Beban Luar Biasa			
JUMLAH POS LUAR BIASA			
SURPLUS/DEFISIT - LO		- 9.067.169.077	- 11.664.401.762

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 KANTOR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	32.930.158.992	33.786.553.406
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	- 9.067.169.077	- 11.664.401.762
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENABAHKAN/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2		
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3		
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4		
LAIN - LAIN	E.4.5		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	8.188.218.020	10.808.007.348
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		- 878.951.057	- 856.394.414
EKUITAS AKHIR	E.6	32.051.207.935	32.930.158.992

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka mendukung Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu **"Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat."** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Sumberdaya ikan dalam pemanfaatannya apabila dikelola secara tidak profesional maka akan semakin berkurang dan bahkan akan habis dengan sendirinya. Sejalan dengan hal tersebut Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat terus meningkatkan kinerja dalam menjalankan perannya memberikan pelayanan kepada masyarakat nelayan dalam peningkatan produksi hasil perikanan sampai kepada pendistribusian hasil tangkapannya. Sehubungan dengan hal tersebut visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010 – 2024 yang telah ditetapkan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

	Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
<i>Kebijakan Akuntansi</i>	A.5. Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat adalah sebagai berikut:
<i>Pendapatan- LRA</i>	(1) Pendapatan-LRA Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
<i>Pendapatan LO</i>	(2) Pendapatan-LO Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut: Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.
<i>Belanja</i>	(3) Belanja Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN) ,
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

diperoleh dengan pembelian;

dengan memproduksi sendiri;

penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

b. Aset Tetap

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

c. Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik

Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya, Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan,	25 tahun

Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajibanban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas Pos
Laporan Realisasi
Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12.324.198.000;. Pada tanggal 31 Desember 2025 dilakukan revisi atas DIPA Awal Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat yang disebabkan adanya *Penambahan Pagu Belanja Pegawai dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap* dan ada anggaran yang diblokir atau efisiensi oleh Kementerian Keuangan Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PBNP	969.284.000	969.284.000
Jumlah Pendapatan	969.284.000	969.284.000
Belanja		
Belanja Pegawai	4.655.113.000	6.155.113.000
Belanja Barang	4.482.291.000	3.221.599.000
Belanja Modal	380.982.000	137.800.000
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	9.518.386.000	9.514.512.000

Realisasi Belanja
Rp9.049.267.142;

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahunan TA 2025 adalah sebesar Rp9.049.267.142; atau 95,11% dari anggaran belanja sebesar Rp9.614.512.000; Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahunan TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan TA 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	6.155.113.000	6.014.345.818	97,71
Belanja Barang	3.221.599.000	2.897.738.323	89,95
Belanja Modal	137.800.000	137.183.001	99,55
Belanja Bantuan Sosial			
Total Belanja Kotor	9.514.512.000	9.049.267.142	95,11
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	
Jumlah	9.514.512.000	9.049.267.142	95,11

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan 0,73 persen dari periode yang berakhir 31 Desember 2025. Hal ini disebabkan antara lain: Karena adanya Blokir Anggaran Automatic Adjustment sebesar Rp303.560.000; masih berada di dalam Anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Pegawai	6.014.345.818	5.727.081.875	0,95
Belanja Barang	2.897.738.323	5.047.801.330	- 1,74
Belanja Modal	137.000.000	1.036.475.388	- 7,57
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
Jumlah	9.049.084.141	11.811.358.593	- 0,77

Belanja Pegawai
Rp6.014.345.818;

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.014.345.818; dan Rp5.727.081.875; Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,05 persen dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Adanya penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam rangka mendukung program dan kegiatan kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.592.293.056	5.300.111.243	1,06
Belanja Uang Makan ASN	393.907.000	338.184.000	1,16
Belanja Lembur	28.146.000	88.787.000	0,32
Jumlah Kotor	6.014.346.056	5.727.082.243	1,05
Pengembalian BP	238	368	
Jumlah	6.014.345.818	5.727.081.875	1,05

Belanja Barang
Rp2.897.738.323;

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.897.738.323; dan Rp5.047.801.330; Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan 0,57 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan, antara lain:

Berkurangnya kegiatan operasional, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas yang sifatnya bukan kegiatan dari pusat dan adanya efesiensi anggaran dari Kementerian Keuangan.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Barang Operasional	600.360.700	1.150.850.032	0,52
Belanja Barang Operasional Lainnya	69.217.000	112.977.600	0,61
Belanja Persediaan	27.196.500	84.772.200	0,32
Belanja Sewa	50.566.000	72.705.000	0,70
Belanja Jasa	1.458.112.937	1.228.831.152	1,19
Belanja Pemeliharaan	480.770.386	1.025.696.146	0,47
Belanja Perjalanan Dinas	211.514.800	1.371.969.200	0,15
Jumlah Kotor	2.897.738.323	5.047.801.330	0,57
Pengembalian Belanja	-	-	0
Jumlah	2.897.738.323	5.047.801.330	0,57

Belanja Modal
Rp137.183.001;

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp137.183.001; dan Rp1.036.475.388; Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar (0,132) persen dibandingkan TA 2024 disebabkan ada nya aturan untuk pengajuan peralatan dan mesin disesuaikan dengan jumlah pegawai dan keperluannya, kalau mau pengadaan belanja modal harus sesuai dengan perhitungan SBSK RKBMN dan adanya efesiensi anggaran dari Kementerian Keuangan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.183.001	415.633.561	0,33
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	150.051.088	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	470.790.739	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	-	-	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0
Belanja Modal lainnya	-	-	0
Jumlah Belanja Kotor	137.183.001	1.036.475.388	0,132
Pengembalian Belanja Modal			0
Jumlah Belanja Modal	137.183.001	1.036.475.388	0,132

Belanja Modal Tanah
Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA

2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0 persen dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan tidak adanya pengadaan lahan yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan Gedung pelayanan dan area untuk aktivitas perkantoran.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp137.183.001;

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp137.183.001; mengalami penurunan sebesar 33 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp415.633.561; Hal ini disebabkan oleh adanya pembelian peralatan dan mesin. Adapun penambahan tersebut adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Laptop	82.273.200	67.800.000	1,21
P.C Unit	45.459.800	0	0
Printer	9.450.001	24.450.000	3,86
Scanner	0	9.280.000	0
Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Barang	0	0	0
Selang Air	0	19.750.000	0
Sepeda Motor	0	28.304.000	0
Alat Produksi Lainnya	0	49.700.000	0
Lemari Besi/Metal	0	28.000.000	0
Sound System	0	0	0
Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	0	35.700.000	0
Meubelair	0	127.599.561	0
Camera Digital	0	21.050.000	0
Traffic Light	0	4.000.000	0
Jumlah Belanja Kotor	137.183.001	415.633.561	33,00
Pengembalian Belanja Modal		-	-
Jumlah Belanja Modal	137.183.001	415.633.561	33,00

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan Rp0;

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0; dan Rp470.790.739;. Realisasi Belanja

Modal TA 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan tidak ada dikarenakan adanya efesiensinanggaran dari Kemneterian Keuangan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	373.312.339	0
Bangunan Gedung Arsip Permanen	0	97.478.400	
Bangunan Terbuka Lainnya	0	0	0
Pagar Permanen	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	470.790.739	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	470.790.739	0

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Jalan Khusus Kompleks	0	0	0
Saluran Lalu Lintas Air	0	0	
Jaringan Listrik Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Belanja Modal Lainnya
Rp0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan TA 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan tidak adanya pengadaan *software* untuk mendukung pekerjaan perkantoran sehari-hari.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Software	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2025 tidak mengalami kenaikan / penurunan sebesar 0% dibandingkan TA 2024.

Belanja Bantuan Sosial
Rp0

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Aset Lancar
Rp3.530.000;

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.530.000; dan R2.172.853;.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 01

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Satker disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 02

Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 03
Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.1.4. Piutang Bukan Pajak
Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 04
Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Piutang PNPB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 05
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.			-
2.			
3.			
	Jumlah	0	0

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.
Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Tabel 06
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.			
2.			
	Jumlah	0	0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek Rp0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek
 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.
 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 07
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Beban Dibayar di Muka Rp0

C.1.8. Beban Dibayar di Muka
 Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
 Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.
 Rincian Beban Dibayar di Muka Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 08
Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pembayaran Internet	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah	0	0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0;

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0; dan Rp1.244.853; dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 09
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	0	1.244.853
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	0
Jumlah	0	1.244.853

Persediaan Rp3.530.000;

C.1.10. Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.530.000; dan Rp928.000; dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	3.530.000	928.000
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	3.530.000	928.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Tidak terdapat barang konsumsi senilai 0 berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan. Rincian Persediaan masing-masing Satker disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap
Rp28.096.441.746;

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp28.098.441.746; dan Rp28.922.912.891;. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp3.102.080.000;

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.102.008.000; dan Rp3.102.008.000;. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Mutasi Tanah

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024		(dalam rupiah)
		3.102.080.000
Mutasi tambah:		
Pembelian		0
Mutasi Kurang:		
Revaluasi Aset		0
Penghapusan		-
Saldo Per 31 Desember 2025		3.102.080.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		-
Nilai Buku Per 31 Desember 2025		3.102.080.000

Mutasi tambah:
Tidak ada mutasi tambah
Mutasi kurang:
Tidak ada mutasi kurang

Peralatan dan
Mesin
Rp9.170.186.439;

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp9.274.291.920; dan Rp9.170.186.439;. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024		(dalam rupiah)
		9.170.186.439
Mutasi tambah:		
Pembelian		137.183.001
Hibah		0
Koreksi Tambah		0
Mutasi Kurang:		
Penghapusan		33.077.520
Koreksi Pencatatan		0
Saldo Per 31 Desember 2025		9.274.291.920
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		(8.693.191.078)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025		581.100.842

Mutasi tambah:
Pembelian berupa:

Tabel 13
Pembelian Peralatan dan Mesin TA 2025
(dalam rupiah)

No.	Peralatan dan Mesin	Nilai
1.	P.C Unit	45.459.800
2.	Laptop	82.273.200
3.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9.450.001
4.		
5.		
	Jumlah	137.183.001

Tidak ada Hibah
Tidak ada Reklasifikasi Masuk
Tidak ada Koreksi Tambah

Mutasi kurang:
Adanya penghapusan peralatan dan mesin senilai Rp33.077.520;

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Gedung dan Bangunan
Rp9.752.668.981;

C.2.3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp9.752.668.981; dan Rp9.522.651.981;. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2025
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024		9.522.651.981
Mutasi tambah:		
Transfer Masuk dari Direktorat Kepelabuhan		230.017.000
Mutasi Kurang:		
Koreksi Pencatatan		0
Saldo Per 31 Desember 2025		9.752.668.981
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		(1.883,290.987)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025		7.869.377.994

Mutasi tambah:
Transfer masuk dari Direktorat Kepelabuhan berupa penambahan nilai bangunan Gedung jejaring nelayan senilai Rp230.017.000;
Mutasi kurang:
Tidak ada Koreksi kurang.
Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp27.652.985.287;

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp27.652.985.287; dan Rp27.652.985.287; dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	27.652.985.287
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jalan Kompleks	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 31 Desember 2025	27.652.985.287
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(11.674.102.377)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	15.978.882.910

Mutasi tambah :
Tidak ada mutasi tambah.
Mutasi Kurang :
Tidak ada mutasi kurang
Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
Rp565.000.000

C.2.5. Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp565.000.000 dan Rp565.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	565.000.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 31 Desember 2025	565.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(0)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	565.000.000

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan perencanaan Pembangunan rumah dinas yang belum selesai sampai dengan tanggal neraca.
Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

No.	No. Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1.					
2.					
	Jumlah				

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp22.250.584.442;

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp22.250.584.442; dan Rp21.089.990.816;.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025.

Tabel 18
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	9.274.291.920	(8.693.191.078)	581.100.842
2.	Gedung dan Bangunan	9.752.668.981	(1.883.290.987)	7.869.377.994
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.652.985.287	(11.674.102.377)	15.978.882.910
4.	Aset Tetap Lainnya	565.000.000	0	565.000.000
	Jumlah	47.244.946.188	22.250.584.442	24.994.361.746

Properti Investasi
Rp4.512.070.000;

C.2.8. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing – masing sebesar Rp4.512.070.000; dan Rp4.512.070.000;,. Properti Investasi merupakan aset bangunan yang disewakan. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 19
Rincian Properti Investasi TA. 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Properti Investasi	Tahun 2025	Tahun 2024
Properti Investasi	4.512.070.000	4.512.070.000
	0	0
	0	0
Jumlah	4.512.070.000	4.512.070.000

Akumulasi
Penyusutan
Properti investasi
(Rp544.437.346;)

C.2.9. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing – masing sebesar (Rp544.437.346;) dan (Rp501.236.548;). Akumulasi Penyusutan Properti Investasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 20
Rincian Properti Investasi TA. 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	Tahun 2025	Tahun 2024
Akumulasi Penyusunan Properti Investasi	(544.427.346)	(501.236.548)
	0	0
	0	0
Jumlah	(544.427.346)	(501.236.548)

Piutang Jangka
Panjang
Rp00

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Tidak ada Piutang Jangka Panjang pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)
Rp0

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing Satker adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.			-
2.			
	Jumlah	0	0

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA per Satker Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Piutang TPA TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.			
	Jumlah	0	0

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Tabel 23
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.Panjang
TA 2025
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Tagihan TPA			
Lancar		0,5%	0
Kurang Lancar		10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Aset Lainnya
Rp18.375.096;

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp18.375.096; dan Rp19.533.481;.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat terdiri dari Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud
Rp0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel 24

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.		0
2.		0
	Jumlah	0

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Akuntansi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 25

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024		0
Mutasi tambah:		
Pembelian		0
Saldo Per 31 Desember 2025		0
Amortisasi s.d. 31 Desember 2025		(0)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025		0

Mutasi tambah:
Tidak ada mutasi tambah.

Aset Lain-Lain
Rp8.461.052.366;

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp; dan Rp8.967.352.006;. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 26

Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024		9.395.602.366
Mutasi tambah:		
Reklasifikasi dari Aset Tetap		0
Mutasi Kurang:		
Penghapusan		934.550.000
Saldo Per 31 Desember 2025		8.461.052.366
Amortisasi s.d. 31 Desember 2025		(8.442.677.270)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025		18.375.096

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi tambah dari aset yang akan dihentikan penggunaannya

Tidak ada mutasi kurang

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp8.442.677.270;)

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp8.442.677.270;) dan (Rp9.376.068.885;).

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya
TA 2025
(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.				
2.				
Jumlah		0	0	0
B.	Aset Lain-lain	8.461.052.366	8.442.677.270	18.375.096
Jumlah		8.461.052.366	8.442.677.270	18.375.096
Total		8.461.052.366	8.442.677.270	18.375.096

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp34.771.561;

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp34.771.561; dan Rp25.293.685;.

Uang Muka dari
KPPN Rp0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Satker lingkup Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Uang Muka dari KPPN TA 2025
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025
1.	Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	0
2.		
3.		
	Jumlah	0

Utang kepada Pihak Ketiga Rp21.475.705;

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga
 Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp21.475.705; dan Rp21.763.358;. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2025
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	21.475.705
2.		
3.		
	Total	21.475.705

Pendapatan Diterima di Muka Rp13.295.856;

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka
 Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp13.295.856; dan Rp3.530.327;. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	Keterangan
Pengguna Jasa	13.295.856	
Jumlah	13.295.856	

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp21.475.705;

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar
 Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp21.475.705; dan Rp21.763.358;, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	21.475.705	21.763.358
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
Jumlah	21.475.705	21.763.358

Ekuitas
Rp32.051.207.935;

C.7 Ekuitas
Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp32.051.207.935; dan Rp32.930.158.992;. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp953.675.740;

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp953.675.740; dan Rp991.024.989;. Pendapatan tersebut terdiri dari:
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1.256.065	3.788.400	(0,33)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	57.262.613	38.444.523	1,49
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	895.157.062	948.792.066	(0,94)
Jumlah	953.673.740	991.024.989	0,96

Pendapatan akrual pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berasal dari Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi dan Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan.

Beban Pegawai
Rp6.014.345.818;

D.2 Beban Pegawai
Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp6.014.345.818; dan Rp5.720.484.875;. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Gaji	3.222.142.226	3.015.076.195	0,93
Beban Tunjangan-tunjangan	2.764.057.592	2.616.621.680	0,95
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0
Beban Lembur	28.146.000	88.787.000	(3,15)
Jumlah Beban	6.014.345.818	5.720.484.875	0,95

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp24.594.500; dan Rp85.247.200;. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	24.594.500	85.247.200	3,47
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Jumlah Beban	24.594.500	85.247.200	3,47

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.177.968.984; dan Rp2.563.362.090;. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Secara keseluruhan terjadi Kenaikan Beban Barang dan Jasa, hal ini disebabkan peningkatan beberapa pos beban seperti beban langganan listrik, beban jasa profesi, beban honor dan beban bahan seiring dengan meningkatnya aktivitas pelayanan dan diklat. Walaupun secara total beban barang dan jasa mengalami kenaikan tetapi pada beberapa pos beban terjadi penurunan karena penghematan atas beban-beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Beban
Persediaan
Rp24.594.500;

Beban Barang
dan Jasa
Rp2.177.968.984;

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Keperluan Perkantoan	444.743.500	823.098.532	1,85
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	132.000	386.000	2,92
Beban Honor Operasional Satker	91.400.000	107.736.000	1,18
Beban Barang Operasional Lainnya	69.217.000	112.977.600	1,63
Beban Bahan	64.085.200	199.329.500	3,11
Beban Honor Output Kegiatan	0	20.300.000	0
Beban Langganan Listrik	195.823.351	230.701.591	1,18
Beban Langganan Telepon	1.416.126	1.505.923	1,06
Beban Langganan Air	2.557.010	3.592.300	1,40
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	51.225.741	49.173.880	0,95
Beban Sewa	50.566.000	72.705.000	1,44
Beban Jasa Profesi	800.000	13.600.000	17
Beban Jasa Lainnya	1.206.003.056	928.255.764	0,77
Jumlah Beban	2.177.968.984	2.563.362.090	1,18

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp480.770.386; dan Rp1.025.696.146;. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	254.915.000	261.319.500	1,03
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	168.156.886	227.840.565	1,35
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	18.039.000	274.030.312	15,19
Beban Pemeliharaan Jaringan	39.659.500	262.505.769	6,62
Jumlah Beban	480.770.386	1.025.696.146	21,33

Beban
Pemeliharaan
Rp480.770.386;

Beban Perjalanan Dinas
Rp211.514.800;

D.6 Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp211.514.800; dan Rp1.371.969.200;. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh meningkatnya frekuensi perjalanan dinas pegawai untuk menghadiri kegiatan rapat koordinasi atau pelatihan yang diselenggarakan Kantor Pusat dimana perjalanan dinasnya ditanggung sendiri oleh masing-masing satuan kerja. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	179.337.200	922.292.500	514,3
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.025.000	99.950.000	554,5
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	18.000.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14.152.600	305.249.100	2.156
Jumlah Beban	211.514.800	1.371.969.200	648,6

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker tidak memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial
Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Peningkatan beban bansos yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.230.942.289; dan Rp1.894.187.273;. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	289.673.541	401.234.384	1,02
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	223.554.618	214.555.543	(1,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jembatan dan Irigasi	407.238.085	967.576.722	1,08
Beban Penyusutan Jaringan	266.116.862	266.116.862	(1,00)
Beban Penyusutan Properti Investasi	43.200.798	43.200.798	
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.158.385	1.502.964	(0,59)
Jumlah Penyusutan	1.230.942.289	1.894.187.273	4,25
Beban Amortisasi Aset Lainnya	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0
Jumlah Beban	1.230.942.289	1.894.187.273	4,25

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp1.230.942.289;

Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp0

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

D.11 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional
Rp119.291.960;

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Selisih Kurs	0	-	0
Pendapatan Pelepasan Aset	126.380.000	5.661.700	0
Beban Pelepasan Aset	7.088.040	141.667	0
Jumlah Beban	119.291.960	5.520.033	0

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Nihil

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp32.930.158.992;

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp32.930.158.992; dan Rp33.786.553.406;.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Defisit LO
(Rp9.067.169.077;)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah defisit sebesar (Rp9.067.169.077;) dan (Rp11.664.401.762;). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset
Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2025

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
3.	Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0
4.	Barang Persediaan Lainnya	0
Jumlah		0

Selisih Revaluasi Aset Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset
Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

Koreksi Lain-lain Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain
Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik

Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Koreksi Lain-lain TA 2025

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

Transaksi Antar
Entitas
Rp8.188.218.020;

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp8.188.218.020; dan Rp10.808.007.348;.
Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 35
Transaksi Antar Entitas TA 2025

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	1.091.066.122
Ditagihkan ke Entitas Lain	(9.049.267.142)
Transfer Masuk	230.017.000
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	8.188.218.020

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).
Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp1.091.066.122; sedangkan DKEL sebesar Rp9.049.267.142;.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.
Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp230.017.000; terdiri dari:

Tabel 36
Transfer Masuk TA 2025

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Gedung dan Bangunan		230.017.000
2.			0
Jumlah			0

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2025.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Pengesahan Hibah Langsung TA 2025

No.	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.			0
2.			0
Total Pengesahan			0
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Ekuitas Akhir
Rp32.051.207.935;

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp32.051.207.935; dan Rp32.930.158.992;.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian – kejadian penting setelah tanggal neraca pelaporan.

F.1 Pengungkapan Lain-lain

F.1 Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: KEP.34/MEN-KP/KU.611/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: KEP.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Akuntansi Bogor pada tanggal 08 Juni 2023 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Anam Tofani, S. Pi., M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	: Dwi Ari Priyanto, ST., M.Si
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Junita E Damanik, SE
Bendahara	: Turbina

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Anam Tofani, S. Pi., M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	: Dwi Ari Priyanto, ST., M.Si
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Junita E Damanik, SE
Bendahara	: Ayu Aprilly Yanti, SE

Semester I Tahun Anggaran 2025

Pada bulan tanggal 20 Maret 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat melakukan ralat SPM untuk potongan sewa rumah dinas yang dulunya Akun 425131 menjadi Akun 425151, adapun SPM yang di ralat adalah :

1. SPM No.00001A tanggal 1 Januari 2025 yang terbit SP2D No.250931503000001 tanggal SP2D 1 Januari 2025, senilai Rp189.420; potongan : Penerimaan Pembayaran Sewa Ruma Dinas Negara an. Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. SPM No.00002A tanggal 1 Januari 2025 yang terbit SP2D No.250931503000002 tanggal SP2D 1 Januari 2025, senilai Rp189.420; potongan : Penerimaan Pembayaran Sewa Ruma Dinas Negara an. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
3. SPM No.00007A tanggal 13 Januari 2025 yang terbit SP2D No.250931503000008 tanggal SP2D 1 Pebruari 2025, senilai Rp189.420; potongan : Penerimaan Pembayaran Sewa Ruma Dinas Negara an. Pegawai Negeri Sipil (PNS).
4. SPM No.00008A tanggal 13 Januari 2025 yang terbit SP2D No.250931503000002 tanggal SP2D 1 Pebruari 2025, senilai Rp189.420; potongan : Penerimaan Pembayaran Sewa Ruma Dinas Negara an. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
5. SPM No.00027A tanggal 14 Pebruari 2025 yang terbit SP2D No.250931503000021 tanggal SP2D 1 Maret 2025, senilai Rp189.420; potongan : Penerimaan Pembayaran Sewa Ruma Dinas Negara an. Pegawai Negeri Sipil (PNS).
6. SPM No.00028A tanggal 14 Pebruari 2025 yang terbit SP2D No.250931503000022 tanggal SP2D 1 Maret 2025, senilai Rp189.420; potongan : Penerimaan Pembayaran Sewa Ruma Dinas Negara an. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat pada tanggal 28 Mei 2025 melakukan lelang peralatan dan mesin berupa 4 unit kendaraan roda 4, 1 unit kendaraan roda 3 dan 1 unit kendaraan roda 2, lelang berakhir pada tanggal 4 Juni 2025. Hasil lelang sebesar Rp126.580.000; di setor ke kas negara.

Semester II Tahun Anggaran 2025

Pada bulan Desember 2025 terdapat beberapa akun yang perlu kami jelaskan seperti berikut :

1. Akun 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar merupakan kewajiban langganan listrik, telpon, air dan internet pemakaian bulan Desember 2025 yang dibayar pada Januari 2026 senilai Rp21.475.705;.
2. Akun 219211 Pendapatan Sewa Diterima di Muka yaitu pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan yang tercatat sebagai Barang Milik Negara maupun Properti Investasi yang telah diterima sebelum masa berlaku kontrak selesai senilai Rp783.280;
3. Akun 219212 Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka merupakan pendapatan dari penatausahaan BMN yang telah ditetapkan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNPB berupa

pendapatan sewa rumah dinas, dan pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan Tusi sebelum masa berlakunya kontrak selesai senilai Rp12.512.576;.

4. Akun 313221 Transfer Masuk berupa transfer masuk penambahan nilai gedung jejaring nelayan dari Direktorat Kepelabuhanan senilai Rp230.017.000;.
5. Akun 425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin yang dilakukan lelang peralatan dan mesin berupa 4 unit kendaraan roda 4, 1 unit kendaraan roda 3 dan 1 unit kendaraan roda 2, lelang berakhir pada tanggal 4 Juni 2025 senilai Rp126.580.000; yang sudah disetor ke kas negara.
6. Akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan merupakan pendapatan yang berasal dari sewa gedung dan bangunan yang tercatat sebagai BMN maupun Properti Investasi senilai Rp1.256.065;.
7. Akun 425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi berupa sewa rumah dinas, sewa tanah dan pemeliharaan prasarana dan penggunaan bangunan senilai Rp57.262.613;.
8. Akun 425621 Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan yang berupa jasa kebersihan kawasan, jasa tambat labuh dan jasa kebersihan kolam pelabuhan senilai Rp895.157.062;.